

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, setiap negara melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar standar hidup masyarakat meningkat, yakni dengan memaksimalkan berbagai potensi sumber daya yang nantinya berpengaruh pada kenaikan pendapatan perkapita. Namun, Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena pada kenyataannya kenaikan pendapatan perkapita yang naik secara signifikan tidak membuat seluruh masyarakat menjadi lebih sejahtera (Farhan & Sugianto, 2022).

Dalam proses mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan, suatu negara harus mengenali berbagai permasalahan ekonomi yang ada di negara tersebut dan menentukan arah kebijakan pembangunannya. Pembangunan ekonomi yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan naiknya pendapatan perkapita sebagai indikator moneter, tetapi juga seluruh aspek dalam peningkatan kualitas hidup, melek huruf, serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Inti persoalan pembangunan khususnya pada negara berkembang adalah terkait aspek distribusi pendapatan serta pemerataan hasil pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan semua elemen masyarakat dengan adil dan proporsional (Sari, Soleh, & Wafiaziza, 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi banyak negara, khususnya negara berkembang, adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ketidaksetaraan pendapatan adalah masalah utama di negara-negara berkembang.

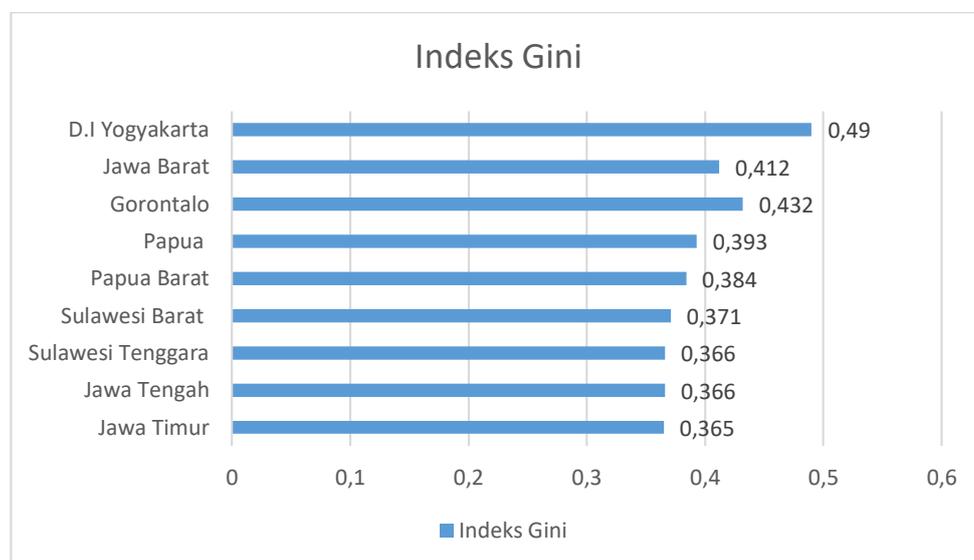
Ketimpangan pendapatan mengacu pada situasi di mana masalah muncul sebagai akibat dari perbedaan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang semakin besar akan mengakibatkan dampak negatif karena dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Kesenjangan pendapatan dapat menimbulkan sejumlah masalah, termasuk tingginya angka kemiskinan, kecemburuan sosial serta menimbulkan tindak kriminalitas antar masyarakat (Sholikah & Imaningsih, 2022).

Menurut Oxfam dalam (Nadya & Syafri, 2019), Salah satu negara dengan tingkat ketimpangan cukup parah di dunia adalah Indonesia, dimana gabungan aset empat warga negara terkaya di negara ini sama dengan aset 100 juta warga miskin. Oleh karena itu, adanya fenomena kesenjangan distribusi pendapatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalah ketimpangan pendapatan telah menjadi fokus perhatian sejak lama untuk segera diatasi. Pembangunan negara merupakan isu krusial dan termasuk penting karena menjadi target utama Indonesia dalam SDG's di Tahun 2030 mendatang (Alfadhillah et al., 2023) Demi terwujudnya hal tersebut, maka tiap –tiap wilayah Provinsi di Indonesia harus mampu berkontribusi dalam penciptaan kesejahteraan masyarakatnya guna mendukung inisiatif pembangunan bangsa serta upaya dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong agar pendapatan terdistribusi secara merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi hampir di tiap – tiap wilayah di Indonesia, baik itu ketimpangan tinggi, sedang, maupun rendah. Salah satu wilayah tersebut adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini memiliki pembangunan ekonomi yang maju serta termasuk dalam pusat perekonomian di Pulau Jawa yang terbukti

dengan kontribusinya terhadap PDRB nasional sebesar 15%. Namun kontribusi perekonomian di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh beberapa Kota/Kabupaten antar daerah yang begitu masih sangat timpang. Kota Surabaya berkontribusi sebesar 25% terhadap perekonomian yang ada di Jawa Timur, lalu disusul oleh Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan berbanding terbalik dengan Kabupaten Bangkalan yang berkontribusi hanya sebesar 2,4 % (BPS Jatim, 2022).

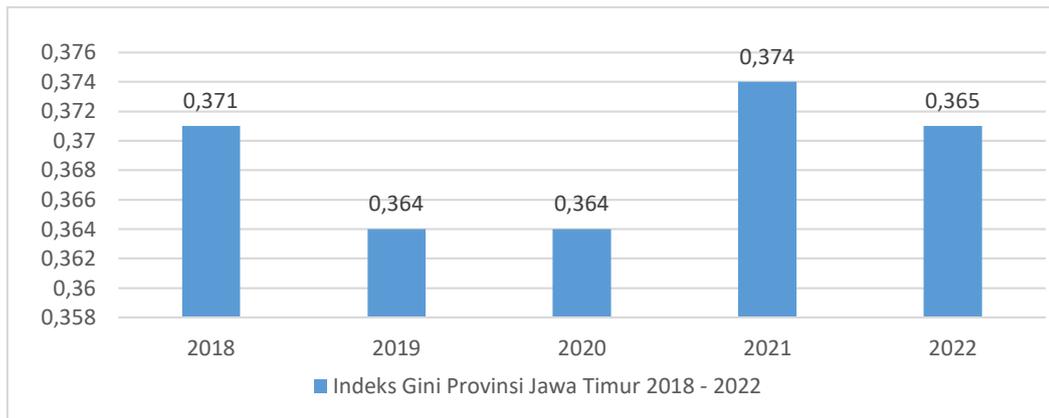
Gambar 1. 1 Provinsi dengan Indeks Gini Terbesar Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Walaupun Jawa Timur merupakan bagian dari pusat perekonomian dan pemerintah, namun bukan berarti provinsi Jawa Timur tidak memiliki permasalahan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Pada gambar 1.1 terlihat bahwa provinsi Jawa Timur menempati Provinsi dengan 10 besar tingkat ketimpangan tertinggi di seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 2017 angka gini rasio Provinsi Jawa Timur berada di angka 0,415 angka ini melebihi Gini Rasio Nasional sebesar 0,39 (BPS Jatim, 2017)

Gambar 1. 2 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

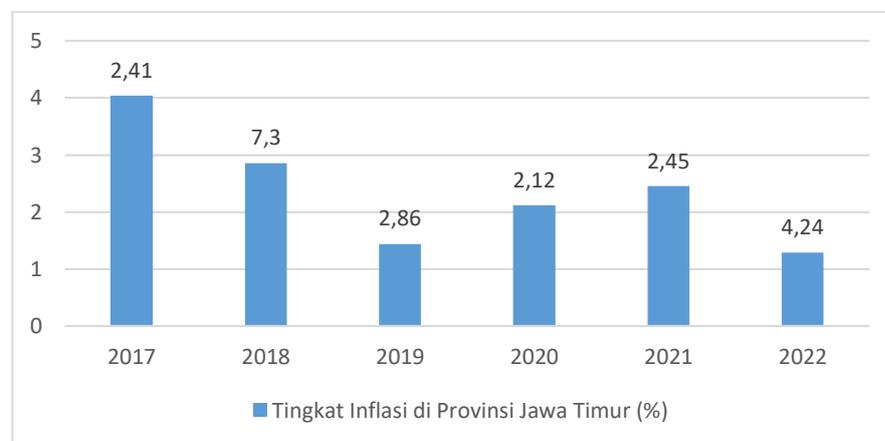
Pada tahun 2018 – 2022 gini rasio dari Provinsi Jawa Timur ini terlihat fluktuatif. Pada tahun 2019- 2020 sempat terjadi penurunan dan stagnan di angka 0,364. Adanya tren penurunan ini belum menunjukkan bahwa ketimpangan menurun, karena angka tersebut kembali meningkat pada tahun berikutnya sebelum kembali menurun pada tahun 2022, meskipun perbedaannya tidak signifikan.

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, tidak hanya karena perbedaan pembangunan antar wilayah, potensi SDA, Kualitas SDM tetapi juga berbagai faktor ekonomi di wilayah tersebut dapat menjadi penyebab ketimpangan (Hariani, 2019). Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, Salah satu faktor lainnya yang penting dalam mengurangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dapat melalui indikator makroekonomi, Faktor makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan salah satunya adalah inflasi. Inflasi terjadi ketika harga-harga naik secara terus menerus atau berkelanjutan. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Lonjakan inflasi akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan apabila hal tersebut berlangsung secara

berkepanjangan, akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang menjadikan ketimpangan kian meluas (Rahman & Putri, 2021).

Kondisi inflasi yang terlalu tinggi di suatu wilayah tanpa adanya pemerataan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, meluasnya kemiskinan, berkurangnya kesejahteraan, dan meningkatnya ketimpangan. (Prastiwi et. al 2019).

Gambar 1. 3 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur



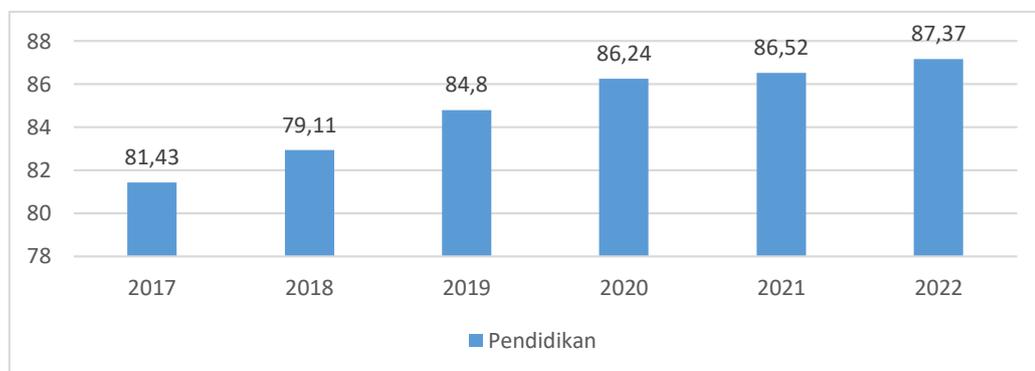
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, inflasi di Provinsi Jawa Timur berfluktuasi dan cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Tingkat inflasi tertinggi sebesar 7,3% pada tahun 2018, diikuti dengan inflasi terendah sebesar 2,12% pada tahun 2020. Fluktuasi inflasi akan berdampak pada pendapatan daerah, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antar daerah (Wahyuni dan Andriyani, 2022).

Pembangunan ekonomi terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, semakin besar pula keterbukaannya terhadap ide-ide baru dan kesempatan untuk mencapai

kesejahteraan melalui kenaikan upah. Sebuah investasi keluarga dan kemampuan bawaan dalam pendidikan berperan penting dalam menjabarkan terkait ketimpangan pendapatan dan juga mobilitas pendapatan pada setiap generasi (Fatsabit & Yusran, 2019). Melalui Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan ketrampilan serta memungkinkan untuk mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga kehidupan suatu individu menjadi lebih sejahtera dan membuat angka ketimpangan menjadi semakin rendah.

Gambar 1. 4 Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa nilai tingkat pendidikan, yang dihitung dengan menggunakan data dari Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah di Jawa Timur, meningkat dari tahun ke tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan sekolah menengah. Menurut teori *human capital* yang dikatakan oleh Gary S. Becker, investasi yang paling penting adalah di bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Menurut teori ini, orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Berdasarkan hal ini, masuk akal jika peningkatan kualitas manusia di suatu wilayah akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya, sehingga nantinya akan

mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Berdasarkan hal ini, cukup beralasan jika peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya, sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan gizi diharapkan dapat memacu inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Pembangunan ekonomi di suatu daerah, terutama pada daerah berkembang cenderung lambat apabila pemerintah kurang memperhatikan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang meningkat, membuat banyaknya tersedia tenaga kerja. Ketika tenaga kerja dibutuhkan, memiliki banyak pekerja terampil di satu lokasi merupakan sumber daya yang tak ternilai harganya. Ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan (Laut et al., 2020). Angkatan kerja yang meningkat seharusnya diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja sehingga angkatan kerja yang tinggi akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Daengs, 2020).

Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbanyak menempati urutan ke 4 terbanyak di dunia. Semakin banyaknya jumlah penduduk membuat jumlah tenaga kerja menjadi ikut meningkat, hal ini dapat berdampak positif dan juga negatif bagi ekonomi Indonesia. Secara positif, jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Sementara itu, dampak negatifnya terjadi ketika jumlah tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta

meningkatnya ketimpangan. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan juga terkait dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan yang diterima adalah biasanya dalam bentuk upah. Upah minimum merupakan salah satu jenis kebijakan yang dapat membantu memastikan bahwa pekerja menerima upah yang adil, termasuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Tujuan pemerintah menetapkan upah minimum adalah untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja atau buruh agar tidak tereksplotasi dalam bekerja dan menerima upah sesuai standar kebutuhan hidup layak. Upah minimum harus ditetapkan secara seimbang agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika upah minimum yang diberikan kepada pekerja terlalu rendah atau dibawah kebijakan, maka hal ini dapat mengurangi pendapatan kelas pekerja. Hal ini berakibat pekerja dengan pendapatan yang rendah akan semakin mengalami kesenjangan yang timpang dengan golongan masyarakat berpendapatan tinggi (Ginting, Anwar, & Kusuma, 2021).

Berdasarkan penjabaran permasalahan dan fenomena diatas, terdapat banyak faktor penyebab adanya masalah ketimpangan terkhusus di Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang dengan ditetapkannya kebijakan yang tepat dan relevan. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti masalah terkait dengan judul “ **Analisis Pengaruh Inflasi, Pendidikan, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendidikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjabaran yang ditulis sebelumnya, penelitian ini memiliki batasan-batasan yang di teliti agar pembahasan dapat terfokus , diantaranya:

1. Penelitian ini mencakup data *Time Series* periode 2010-2022 di Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel yang digunakan yaitu ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio sebagai variabel dependen , sedangkan variabel Inflasi, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan berbagai macam kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai ketimpangan pendapatan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan ide dan bahan untuk arah kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan.